

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Kecamatan Cimerak Tahun 2019 didasari oleh Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Cimerak berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perajian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara teknis pada tahun 2019 penyusunan Laporan Kinerja telah mengacu pada Dokumen Rencana Kinerja tahun 2019 serta Perjanjian Kinerja tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Cimerak tahun 2019 mengacu pada:

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.
8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi serta Potensi Kecamatan Cimerak

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan sebagai berikut:

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan.
3. Seksi - Seksi
 - a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kedudukan Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh camat, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani urusan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Cimerak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Mengkoordinasikan peneapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan.
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- h. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah, yang meliputi aspek : perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan, dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Cimerak dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.

1.3.2 Potensi Kecamatan Cimerak

Berdasarkan potensi yang dimiliki Kecamatan Cimerak antara lain adalah Kegiatan perekonomian Kecamatan Cimerak yang mayoritas masyarakatnya bergerak dalam bidang pertanian, mencakup pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan, tetapi bagaimana hasil pertanian dapat menghasilkan produk yang berkualitas, hasil yang optimal dan manajemen pemasaran yang handal, yang pada akhirnya pertanian menjadi industri yang menghasilkan produk pertanian yang dapat bersaing dipasar global. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kecamatan Cimerak, antara lain luasnya sumber daya lahan, Kondisi sosial

budaya masyarakat Kecamatan Cimerak yang agamis, partisipatif dan kebersamaan merupakan modal utama yang menunjang terhadap kegiatan pembangunan.

Tabel 1.1
Potensi Kecamatan Cimerak

No	Bidang	Potensi
1	Bidang Pariwisata	<p>Potensi yang sudah ada :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Masawah : Pantai Madasari - Desa Cimerak : Green Canyon (Janggala) <p>Potensi yang perlu pengembangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Sukajaya : Goa Kolor, Goa Bagong, Goa Ayam, Body Rafting dan Desa Wisata - Desa Kertamukti : Pantai Keusik Luhur, Pantai Balekambang,
2	Bidang Sosial Budaya	Desa Kertamukti dengan Seni Budaya Kuda Lumping, Desa Limusgede: Calung Kombinasi, Ebeg.
3	Bidang Perikanan	<p>Perikanan Laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Legokjawa : TPI Legokjawa - Desa Masawah : TPI Madasari - Desa Kertamukti : TPI Muaragatah <p>Perikanan Kolam :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Batumalang : Kolam Pembesaran/ Budidaya Ikan Berbagai Jenis (BBI) - Desa Limusgede : Budidaya Ikan Lele - Desa Legokjawa : Tambak Udang - Desa Mekarsari: Budidaya Ikan Mas
4	Bidang Transportasi	Tidak ada
5	Bidang Pertanian	<p>Luas sawah yang sudah ada : 2,764 hektar</p> <p>Luas sawah baru : 14,33 hektar</p>
6	Bidang Perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Keuangan Mikro <ul style="list-style-type: none"> - Desa Legokjawa : LPK, BRI Unit Ciparanti - Desa Cimerak : UPK, BRI Unit Cimerak 2. Usaha Mikro <ul style="list-style-type: none"> - Desa Legokjawa : Pengrajin makanan Sale - Desa Limusgede : Pengrajin makanan Sale, Keripik, Pengrajin anyaman Lidi dan Bambu - Desa Kertamukti : Pengrajin Makanan Keripik Singkong - Desa Ciparanti : Pengrajin makanan Semprong, Sale - Desa Cimerak : Pengrajin makanan Keripik Singkong

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN

2.1.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Cimerak merupakan satu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Kecamatan Cimerak yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

2.1.2 Visi dan Misi

VISI

SKPD Kecamatan Cimerak Yaitu **“MEWUJUDKAN PELAYANAN MASYARAKAT YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL SEBAGAI PENUNJANG KAWASAN UTAMA PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PARIWISATA DI PANGANDARAN”**

MISI

1. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.
3. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.
4. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengembangkan Sektor Industri dan Pariwisata.

5. Mengoptimalkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Memperhatikan Visi dan Misi tersebut di atas, proses perencanaan yang transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan mewujudkan pemerintahan yang baik setiap kebijakan publik beserta proses permusyawaratannya diikuti, diketahui dan di pahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam permusyawaratan, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakonodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan system informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik. Visi, Misi menerangkan tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran, serta target kinerja sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Cimerak tahun 2016-2021

Dalam mewujudkan Visi tersebut dilakukan upaya-upaya yang dirumuskan melalui Misi.

Dalam rangka pelaksanaan Misi maka diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi tersebut, menyangkut Tujuan dan Sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Misi Kecamatan Cimerak adalah sebagai berikut :

Misi Pertama,

Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.

Misi Kedua:

Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Misi Ketiga,

Mengoptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Misi Keempat,

Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengembangkan Sektor Industri dan Pariwisata.

Misi Kelima,

Mengoptimalkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

2.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi Pertama: Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.	Meningkatkan Kegiatan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	Terwujudnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat
Misi Kedua: Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat

Misi Ketiga: Mengoptimalkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terwujudnya Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
Misi Keempat : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur untuk Mengembangkan Sektor Industri dan Pariwisata.	Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur untuk menunjang dan mengembangkan ekonomi di bidang industry dan pariwisata	Terwujudnya Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sebagai penunjang kawasan industri dan pariwisata.
Misi Kelima : Mengoptimalkan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa /Kelurahan	Terwujudnya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan desa/Kelurahan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam prioritas pembangunan.

2.3 Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis dan indikator Kinerja Utama Kecamatan Cimerak sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator
1	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan, Pelayanan Administrasi Perizinan dan Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif
2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Cakupan Pelayanan Administrasi Kependudukan

3	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Cakupan Pelayanan Administrasi Perizinan
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif

2.4 Perencanaan Kinerja Tahun 2019

Kebijaksanaan dan program merupakan Stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pembangunan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja merupakan pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

No	Kebijakan	Program
1	Meningkatkan Pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam upaya menunjang pekerjaan dan pelayanan Masyarakat	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2	Melaksanakan dan menerapkan prosedur dalam pengembangan ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan praturan perundang-undangan yang berlaku	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

2.6 Target Kinerja Program

No.	Sasaran	Program	Kinerja		Anggaran Program
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kab. Pangandaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	<p>Terpenuhinya kebutuhan materai dlm satu tahun</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan listrik, dan Internet</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kebersihan</p> <p>Terlaksananya keamanan kantor dengan baik</p> <p>Terlaksananya Jasa Penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga dengan baik</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan ATK dalam satu tahun</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan cetak dan ganda</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan lainnya</p> <p>Terpenuhinya</p>	<p>- 120 Materai</p> <p>- 2 Rekening</p> <p>- Honor Jasa Kebersihan dan alat pakai habis</p> <p>- Honor Jasa Pengamanan Kantor</p> <p>- Honor Jasa Penunjang kegiatan perkantoran dan rumah tangga</p> <p>- 1 Paket ATK dalam 1 Tahun</p> <p>- Fotocopy, Cetak Disposisi Masuk dan Keluar</p> <p>- Kebutuhan Komponen alat Listrik 1 paket</p> <p>- Koran dan</p>	151.153.835

			<p>bahan bacaan kantor</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan mamin rapat dan mamin tamu</p> <p>Terlaksananya Rakor dan rapat-rapat luar daerah</p> <p>Terlaksananya Rakor dan rapat-rapat Dalam daerah</p> <p>Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional</p> <p>Terlaksananya Pelayanan Terpadu Kecamatan</p>	<p>majalah</p> <p>- Mamin Rapat dan Tamu 1 Paket</p> <p>- Rapat-rapat luar daerah</p> <p>- Rapat-rapat dalam daerah</p> <p>- Pajak kendaraan bermotor</p> <p>- Honor Jasa Pelayanan Terpadu Kecamatan</p>	
2.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<p>Terpeliharanya bangunan gedung kantor</p> <p>Terpeliharanya Kendaraan Dinas</p> <p>Tersedianya Peralatan Komputer</p> <p>Tersedianya peralatan perlengkapan Rumah Tangga</p>	<p>- Gedung kantor kecamatan 1 unit, rumah dinas beserta aula.</p> <p>- BBM, Suku cadang, service Pembayaran pajak kendaraan dinas</p> <p>- 1 Unit PC dan 3 Unit Printer</p> <p>- Perlengkapan kebersihan rumahtangga kantor</p>	59.492.165
3.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	<p>Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</p> <p>Tersedianya</p>	<p>- 1 Laporan</p> <p>- 1 Laporan</p>	77.641.000

		Keuangan	<p>Laporan Keuangan Semesteran</p> <p>Tersedianya Laporan Akhir Tahun</p> <p>Tersedianya laporan perencanaan program dan kegiatan SKPD</p> <p>Tersedianya Pengelolaan sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Tersedianya Pengelolaan sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah</p> <p>Terselenggaranya Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</p> <p>Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa</p>	<p>- 1 Laporan</p> <p>- Honorarium Jasa tenaga aplikasi Simral Perencana dan kegiatan SKPD</p> <p>- Honorarium jasa tenaga aplikasi SIMDA Keuangan</p> <p>- Honorarium jasa tenaga aplikasi Simda BMD</p> <p>- 1 Kegiatan se Kecamatan Cimerak</p> <p>- 1 Kegiatan untuk 15 Desa</p>	
4.	Terbinanya Administrasi Desa, Produk Hukum Desa, Penyelenggaraan Pemeritahan Desa, Tersosialisasinya Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa	- 2 Kegiatan Untuk 15 Desa	0

2.7 Target Kinerja Kegiatan

Tabel 2.2
Target Kinerja Kegiatan Kecamatan Cimerak Tahun 2019

No.	Program	Kegiatan	Kinerja		Anggaran Kegiatan
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa Materai Hasil : Terlayannya Administrasi Perkantoran	100 Materai 6000 dan 175 materai 3000	Rp. 1.878.000
		b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Belanja Telepon, Listrik dan Speedy Hasil : Lancarnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	2 Token dan pulsa internet	Rp. 14.069.566
		c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Masukan : Jumlah dana Keluaran : Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas Hasil : Tebayarnya pajak kendaraan roda 4 dan roda 2	7 unit motor dan 1 unit mobil	Rp.2.650.000
		d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya jasa kebersihan kantor Hasil : Terciptanya lingkungan kantor yang bersih	2.420 m ²	Rp. 17.710.750
		e. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya pengamanan kantor Hasil : Terciptanya lingkungan kantor yang aman	12 Bulan	Rp. 25.200.000
		f. Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan rumah tangga	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan rumah tangga Hasil : Terciptanya penunjang perkantoran dan rumah tangga yang baik	0	Rp. 0
		g. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya ATK Hasil : Jenis alat tulis kantor yang tersedia	12 Bulan	Rp. 16.000.000
		h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan Hasil : Jumlah cetakan, penggandaan, penjilidan dan banner yang dibelanjakan	12 Bulan	Rp. 11.397.360
		i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Hasil : Jumlah komponen listrik yang dibutuhkan	7 Jenis	Rp. 3.955.644

		j.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : Jumlah majalah atau koran yang diperlukan setiap bulan	12 Bulan	Rp.3.600.000
		k.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu Hasil : Jumlah makanan dan minuman yang dibutuhkan setiap bulannya	1.033 box nasi	Rp. 12.477.000
		l.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan dan difasilitasi Hasil : Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	Rp. 10.020.515
		m.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan dan difasilitasi Hasil : Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12 Bulan	Rp. 32.195.000
		n.	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Kecamatan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Pelayanan Terpadu yang dilaksanakan Hasil : Terlaksananya Pelayanan Terpadu di Kecamatan	0	Rp. 0
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Hasil : -	1 Terpeliharanya gedung kantor	Rp. 4.180.000
		b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Hasil : Berfungsinya kendaraan dinas	1 Bulan untuk service kendaraan , suku cadang, BBM 400 liter	Rp. 31.812.165
		c.	Pengadaan Komputer	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Peralatan Komputer Hasil : Jumlah Komputer yang tersedia	2 Unit Laptop	Rp. 19.500.000
		d.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor Kecamatan Hasil : Terciptanya kebutuhan peralatan rumahtangga kantor	Paket unit kebutuhan rumahtangga kantor	Rp. 4.000.000
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem	a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	Rp. 540.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD	Hasil : Jumlah laporan yang dibuat		
	b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya laporan keuangan semesteran Hasil : Jumlah laporan yang dibuat	2 Laporan	Rp. 620.000
	c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya laporan keuangan akhir tahun Hasil : Jumlah laporan yang dibuat	1 Laporan	Rp. 610.000
	d. Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terciptanya kelancaran pembuatan laporan keuangan akhir tahun Hasil : Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	12 Bulan	Rp. 21.300.000
	e. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Terciptanya kelancaran pembuatan laporan perencanaan program dan kegiatan SKPD Hasil : Tersusunnya laporan perencanaan program dan kegiatan SKPD	12 Bulan	Rp. 21.300.000
	f. Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Hasil : Terciptanya penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah	12 Bulan	Rp. 21.300.000
	g. Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya monitoring Pelaksanaan musrenbang Desa Hasil : Jumlah Desa yang dibina	11 Desa	Rp. 2.289.500
	h. Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Pelaksanaan musrenbang kecamatan Hasil : Terlaksananya penyelenggaraan Musrenbang di kecamatan	1 dokumen perencanaan pembangunan	Rp. 9.001.500
	i. Penyusunan Renja SKPD	Masukan : Jumlah Dana Keluaran : Tersedianya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa Hasil : Jumlah Desa Yang Dibina	2 Dokumen	Rp. 680.000

2.8 Laporan Anggaran per Sasaran

Tabel 2.3

Laporan Anggaran Per Sasaran Kecamatan Cimerak tahun 2019

No	Sasaran	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran	276.996.000
2.	Tersusunnya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Termonitornya dan Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pemangunan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa	11.291.000

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Kecamatan Cimerak berdasarkan sasaran strategis dilakukan dengan :

3.1.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019

Tabel 3.1
Perbandingan target dan realisasi kinerja Kecamatan Cimerak

No.	Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran	100 %	96,74 %
2.	Tersusunnya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Termonitornya dan Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pemangunan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa	100 %	100 %

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun 2019

Tabel 3.2
Perbandingan target dan realisasi kinerja Kecamatan Cimerak

No	Sasaran	Realisasi th 2018	Realisasi th 2019
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.656.000	1.878.000
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	15.356.731	14.069.566
c.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	0	2.650.000
d.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.000.000	17.710.750
e.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	24.000.000	25.200.000
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Kegiatan Perkantoran dan rumah tangga	0	0
g.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.244.000	
h.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.400.000	16.000.000
i.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.132.000	11.397.360
j.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.600.000	3.955.644
k.	Penyediaan Makanan dan Minuman	4.100.000	3.600.000
l.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	19.152.700	12.477.000
m.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah	11.857.000	32.195.000
n.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	23.790.000	10.020.515
		0	0
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
a.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	5.000.000	4.180.000
b.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	31.716.000	31.812.165
c.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	4.000.000	4.000.000
d.	Pengadaan Komputer		
e.	Pengadaan Peralatan Rumah tangga	0	19.500.000
	Peningkatan Disiplin Aparatur	3.361.000	0
a.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	11.995.000	

	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		0
a.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
b.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	170.000,00	540.000
c.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	380.000,00	620.000
d.	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan SKPD	265.000,00	610.000
e.	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	21.440.000,00	21.300.000
f.	Penyelenggaraan Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Barang Daerah	21.000.000,00	21.300.000
g.	Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	20.999.875,00	21.300.000
h.	Monitoring Pelaksanaan Musrenbang Desa	7.460.000,00	9.001.500
		1.902.500,00	0
	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		0
a.	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	1.300.000,00	0
b.	Monitoring Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan ke Desa	2.425.000,00	0
	Jumlah	288.287.000	288.287.000

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Cimerak s/d tahun 2019 dengan target jangka menengah

No.	Sasaran	Realisasi s/d th 2019	Target jangka menengah
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran	96,74 %	Ada
2.	Tersusunya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Termonitornya dan Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pemangunan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa	100 %	Ada
3.	Terbinanya Administrasi Desa, Produk Hukum Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Termonitor dan Terevaluasinya Penggunaan APB Desa, Tersosialisasinya Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	0 %	Belum ada

3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar nasional

Tabel 3.4
perbandingan realisasi kinerja Kec. Langkaplancar s/d tahun 2019 dengan standar nasional

No.	Sasaran	Realisasi th 2019	Standar Nasional
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran	96,74 %	
2.	Tersusunnya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Termonitornya dan Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pemangunan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa	100 %	
3.	Terbinanya Administrasi Desa, Produk Hukum Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Termonitor dan Terevaluasinya Penggunaan APB Desa, Tersosialisasinya Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	0 %	

3.1.5. Analisis penyebab penurunan kinerja dan solusi yang telah dilakukan

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Penurunan Kinerja Kecamatan Cimerak dan Solusi yang dilakukan

No.	Sasaran	Penurunan	Solusi
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran	Tidak ada penurunan	
2	Tersusunnya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Termonitornya dan Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pemangunan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Tidak ada penurunan	
3	Terbinanya Administrasi Desa, Produk Hukum Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Termonitor dan Terevaluasinya Penggunaan APB Desa, Tersosialisasinya Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	Tidak Terealisasi	Proses pembinaan yang dilakukan harus sesuai dengan anggaran yang direncanakan

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.6
Analisis Penyebab Penurunan Kinerja Kecamatan Cimerak dan Solusi yang dilakukan

No.	Sasaran	Efisien/tidak efisien	Alasan
1	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran	Efisiensi	
2	Tersusnya Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan, Termonitornya dan Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pemangunan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Efisiensi	
3	Terbinanya Administrasi Desa, Produk Hukum Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Termonitor dan Terevaluasinya Penggunaan APB Desa, Tersosialisasinya Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	tidak Efisiensi	Karena Tidak adanya serapan anggaran dari program tersebut

3.1.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian target kinerja

Tabel 3.7
Analisis Program penunjang/bukan penunjang keberhasilan kinerja Kecamatan Cimerak tahun 2019

No.	Sasaran	Program/ Kegiatan yang menunjang	Program/ kegiatan yang tidak menunjang
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	
2	Terbinanya Administrasi Desa, Produk Hukum Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Termonitor dan Terevaluasinya Penggunaan APB Desa, Tersosialisasinya Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	

3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran per Sasaran/Prorgam Kec. Langkaplancar tahun 2019

No	Sasaran	Program	Realisasi Anggaran
1.	Meningkatnya Kinerja Aparatur Pemerintah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Pangandaran	Pelayanan Administrasi Perkantoran	138.923.927
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.529.312
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	77.387.800
2.	Terbinanya Administrasi Desa, Produk Hukum Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Termonitor dan Terevaluasinya Penggunaan APB Desa, Tersosialisasinya Pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa	Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	0
		Jumlah	266.841.039

Berdasarkan tabel 3.8 di atas, realisasi anggaran Kecamatan Cimerak Tahun 2019 adalah sebesar Rp. **266.841.039**. dengan serapan anggaran untuk :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran = 91,91%
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur = 84,93%
3. Program capaian peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan = 99,67%
4. Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keunangan Desa = 0%

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Serapan anggaran di tahun 2019 adalah sebesar **92,56%** sebagaimana uraian berikut :

Anggaran Tahun 2019	Rp. 288.287.000.00
Realisasi Anggaran Tahun 2019	<u>Rp. 266.841.039.00</u>
Selisih/Efisiensi Anggaran tahun 2019	Rp. 21.445.961.00

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Cimerak Tahun 2019 ini merupakan wujud dari rasa tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan untuk disampaikan kepada Bupati.

Berdasarkan Visi, misi, cara pencapaian tujuan, sasaran dan realisasi pelaksanaan dan pencapaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Cimerak, sebagai berikut :

1. Keterbatasan data dan informasi yang diperlukan bagi perencanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya kemampuan dan terbatasnya sumber daya manusia dalam perencanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan.
4. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektifitas program dan kegiatan.
5. Masih kurangnya pegawai di Sub Bagian, Kepala Seksi dan belum sesuai formasi pegawai yang sudah ditetapkan.
6. Kurangnya peralatan komputer dan perlengkapannya sehingga menghambat pelayanan terhadap masyarakat.

Berbagai permasalahan dan hambatan yang timbul sudah dapat diatasi yaitu dengan solusi memanfaatkan potensi dan kemampuan yang ada, namun demikian untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu dilakukan :

1. Pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana kerja yang berupa mebeleur, ruang kerja, kendaraan roda dua, komputer, printer dan perlengkapannya.
2. Penambahan pegawai yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan dibidang tugasnya.
3. Peningkatan koordinasi, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas.

4. Penambahan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang belum terdanai.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Cimerak Tahun 2019 ini dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran secara jelas kegiatan yang sudah dilakukan sehingga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja aparat Pemerintah Kecamatan Cimerak di tahun mendatang.

Cimerak, Januari 2020
CAMAT CIMERAK

ATANG KUNCARA, S.IP
NIP. 19650607 198603 1 019